

**PERAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) PADANG DALAM
MENGADVOKASI KASUS KORUPSI DI KOTA PADANG**

EXSECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

ADINDA SALSABILA

NPM: 2110012111162

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 10/PID-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No.: 10/PID-02/III-2025

Nama : **Adinda Salsabila**
Nomor : **2110012111162**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam Mengadvokasi Kasus Korupsi di Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Reg. No.: 10/PID-02/III-2025

PERAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) PADANG DALAM MENGADVOKASI KASUS KORUPSI DI KOTA PADANG

Adinda Salsabila¹, Uning Pratimaratri¹

¹ Legal Studies Program, Law, Universitas Bung Hatta

E-mail: adindasalsa527@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is a problem that is detrimental to society in efforts to eradicate corruption in Indonesia, including in Padang City, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning criminal acts of corruption and Law Number 40 of 1999 concerning the Press, the role of journalists is very important, such as the case handled by the Padang Independent Journalist Alliance in 2021, the alleged procurement of vocational school student practice equipment at the West Sumatra education office found a state loss of around IDR 5,500,000,000.00 billion Rupiah. The formulation of the problem in this study includes: (1) The role of the Padang Independent Journalist Alliance in advocating corruption cases in Padang City? (2) Obstacles to the Padang Independent Journalist Alliance's advocacy for corruption cases in the city of Padang. This study uses a qualitative method with primary data sources obtained directly using interview techniques with respondents, and secondary data obtained through data sources on AJI Padang's advocacy activities. The results of the study show that: (1) AJI Padang plays a role in supporting advocacy for corruption cases through reporting. Therefore, further support is needed from various parties, including the government, civil society, anti-corruption institutions and advocacy organizations. (2) AJI Padang faces various challenges, such as pressure from certain parties and limited resources, and encourages transparency in the city of Padang.

Keywords: Alliance of Independent Journalists, advocacy, corruption, press freedom, journalism

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Korupsi merupakan perbuatan jahat yang memiliki banyak efek negatif, termasuk memengaruhi perekonomian Negara, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak budaya dan mental masyarakat, mengubah hukum, dan menurunkan kualitas layanan public, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu Negara, lebih mungkin bahwa Negara tersebut tidak sejahtera atau maju dan layanan publiknya memprihatinkan, di sisi lain, Negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.¹

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Pasal 41 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, selain masyarakat pihak yang boleh melaporkan tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri sipil (PNS), aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK.²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya sudah berusia 25 Tahun, jaminan ini kemudian di pertegas dalam peraturan dewan Pers Nomor 5 Tahun

¹ Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara, Artikel ini diakses

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html> pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Pukul 15.15 wib.

² Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, Hardianto, 2019, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Law Reform*, Vol 15, Nomor 1, hlm 90.

2008 tentang standar perlindungan profesi wartawan.

Jurnalis menjadi sangat penting dalam mengungkap dan mengawasi kasus korupsi dalam situasi seperti ini salah satu pilar demokrasi adalah kewajiban moral media massa, termasuk jurnalis, untuk memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan berimbang tentang berbagai masalah, termasuk kasus korupsi. Aliansi Jurnalis Independen Padang adalah salah satu kelompok di kota Padang yang aktif menyuarakan dan mendukung berbagai kasus korupsi, aliansi jurnalis independen adalah organisasi yang mewakili jurnalis profesional di Indonesia.³

Selama periode 2020–2024, kasus korupsi di Indonesia meningkat, Menurut laporan KPK dan data Indonesia Corruption Watch (ICW). Pada tahun 2021 ICW melaporkan kasus korupsi, dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp29,400,000,000,000,00 Triliun dan KPK menangani 120 kasus secara langsung. Tahun 2022 Jumlah kasus korupsi meningkat menjadi 579, dan 1.396 orang diidentifikasi sebagai pelaku, dan 2023 ICW melaporkan ada 791 kasus korupsi, dengan 1.695 tersangka, Tahun 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 93 kasus tindak pidana korupsi dengan 100 tersangka.⁴

Tindak Pidana Korupsi berkembang dengan cepat di kota Padang, kasus yang ditangani oleh aliansi jurnalis independen di kota padang yaitu tahun 2021 adanya dugaan pengadaan alat praktik siswa smk di dinas pendidikan sumbar menemukan kerugian Negara sekitar Rp. 5,500,000,000,00 Miliar, di duga juga ada pemberian gratifikasi berupa jam tangan mewah rolex kepada pejabat daerah.⁵

kurangnya kesadaran publik tentang tugas jurnalis dalam memerangi korupsi.⁶

³ *AJI Padang*, artikel ini <https://aji.or.id/node/11840> diakses pada hari Jumaat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 20.45 wib.

⁴ *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023*, Artikel ini diakses . <https://www.icw.or.id/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023> pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 16.29 wib.

⁵ *Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsurnya*, Artikel ini diakses. <https://djp.kemenkeu.go.id> pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Pukul 17.00 wib.

⁶ Desca Lidya Natalia, 2019, Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Vol 512.472 , hlm 59.

Aliansi Jurnalis Independen di Padang dalam mendukung advokasi kasus korupsi, dan bekerja sama dengan lembaga anti korupsi, masyarakat sipil, media lainnya untuk memantau proses hukum, mengedukasi masyarakat, aliansi jurnalis independen juga menghadapi berbagai tantangan ancaman tekanan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jurnalis dalam pemberantasan korupsi, oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“PERAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) PADANG DALAM MENGADVOKASI KASUS KORUPSI DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam Mengadvokasi Kasus Korupsi di Kota Padang?
2. Kendala-kendala Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam Mengadvokasi Kasus Korupsi di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam Mengadvokasi Kasus Korupsi di Kota Padang
2. Untuk menganalisis Kendala aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam mengadvokasi Kasus Korupsi di Kota Padang

II. METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara dengan responden, dan data sekunder diperoleh melalui sumber data kegiatan advokasi AJI padang

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam Mengadvokasi Kasus Korupsi di Kota Padang

AJI mendorong jurnalis untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi secara menyeluruh dan akurat, terlibat dalam investigasi dan peliputan kasus, dan sering bekerja sama dengan organisasi dan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk mengkritik pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang adalah organisasi yang berkomitmen terhadap kebebasan pers dan transparansi yang aktif menyelidiki dan mengungkap berbagai kasus korupsi di seluruh kota Padang. AJI juga bertanggung jawab atas pengawasan dan laporan kasus korupsi di berbagai bidang, termasuk di pemerintahan. AJI Padang bertindak sebagai pengawas dan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat sipil, LSM, dan otoritas hukum, untuk memastikan informasi tentang dugaan korupsi terbuka.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang sangat berkontribusi dalam advokasi kasus korupsi di kota Padang, ini termasuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat praktik siswa SMK oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat, yang menyebabkan kerugian Negara sekitar Rp. 5,500,000,000,00 miliar.

Peran AJI Padang dalam kasus ini dapat dikategorikan dalam beberapa aspek melalui wawancara dengan responden sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara dengan NH sebagai ketua aliansi jurnalis independen Padang serta Wartawan liputan 6 dan HM sebagai anggota senior AJI Padang:
 - a. Investigasi dan meliputan mendalam
Anggota AJI Padang secara aktif menyelidiki kasus dugaan korupsi ini dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pihak terkait dan laporan resmi.
 - b. Mendorong transparansi akuntabilitas
AJI Padang juga meminta pihak berwenang, seperti kejaksaan tinggi Sumatera Barat dan komisi pemberantasan korupsi (KPK), untuk melakukan penyelidikan kasus ini secara menyeluruh melalui laporan media yang objektif dan kritis.
 - c. Kalaborasi dengan LSM dan Akademisi
AJI Padang juga bekerja sama dengan LSM dan akademisi hukum dan pemerintahan untuk mendukung advokasi anti korupsi.
 - d. Penyebaran informasi ke public

Situs web aliansi jurnalis independen bertugas menyebarkan informasi tentang dugaan korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kasus ini dan mendorong partisipasi publik dalam mengawasinya.

B. Kendala-kendala Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam Mengadvokasi Kasus Korupsi di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam mengadvokasi kasus korupsi di Kota Padang, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait agar peran jurnalisme dalam advokasi pemberantasan korupsi semakin efektif dan berkelanjutan.

Menurut NH sebagai ketua Aliansi jurnalis Independen Padang serta Wartawan liputan 6, Tantangan atau kendala AJI padang adalah dalam pengungkapan kasus korupsi dari KPK, tantangan jurnalis yaitu adalah informasi, seperti:

1. Ancaman dan Intimidasi
Jurnalis yang meliput kasus korupsi sering menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan mereka. ancaman ini dapat berupa tekanan hukum, intimidasi verbal, hingga ancaman fisik yang dapat menghambat kebebasan pers, beberapa jurnalis mengaku menerima ancaman melalui telepon, diawasi oleh orang tak dikenal, atau dikriminalisasi melalui laporan hukum yang dibuat untuk menghalangi pekerjaan mereka.
2. Akses Terbatas terhadap Informasi
Karena birokrasi yang tertutup dan kurangnya transparansi dari instansi terkait, banyak dokumen resmi sulit diakses, meskipun Undang-Undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) telah berlaku, banyak lembaga masih enggan memberikan dokumen yang dapat menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, selain itu, pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan sering kali menolak memberikan keterangan resmi kepada media dengan alasan menjaga reputasi institusi.
3. Intervensi dari Pihak Tertentu

Upaya advokasi sering dihalangi oleh keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut; misalnya, upaya untuk mengungkap fakta dapat dihalangi oleh tekanan politik atau ekonomi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi; dalam beberapa kasus, pemilik media yang memiliki hubungan dengan pejabat atau pelaku korupsi bahkan memaksa jurnalis untuk tidak mempublikasikan liputan investigasi mereka.

4. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Publik

Kendala lain yang dihadapi AJI Padang adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan pemberantasan korupsi, banyak orang tidak peduli dengan kasus korupsi karena mereka pikir mereka tidak mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung., selain itu, orang-orang yang tidak cukup melek media mudah terpengaruh oleh propaganda atau informasi yang menyesatkan dari pihak yang ingin menutupi kasus korupsi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam mengadvokasi kasus korupsi di kota Padang
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang adalah organisasi profesi yang mempertahankan independensi dan kebebasan pers. Aliansi jurnalis independen Padang bertanggung jawab untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum terkait kasus korupsi di Kota Padang, AJI melakukan advokasi melalui pemberitaan investigatif, diskusi publik.
2. Kendala kendala Aliansi Jurnalis Independen (AJI) padang dalam Mengadvokasi kasus Korupsi di Kota Padang
Dalam melaksanakan tugas advokasinya, AJI Padang menghadapi berbagai kendala yang signifikan, ancaman dan intimidasi terhadap jurnalis menjadi salah satu tantangan utama, di mana mereka sering mengalami tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus korupsi. Selain itu, akses terhadap informasi sering kali terbatas akibat birokrasi

yang tertutup dan minimnya transparansi dari instansi terkait.

B. Saran

1. Peningkatan Keamanan bagi Jurnalis
Mengadvokasi keterbukaan informasi, pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa jurnalis yang menyelidiki kasus korupsi menerima perlindungan hukum dan keamanan, selain itu, pemerintah harus lebih jelas dalam memberikan akses ke dokumen publik, terutama yang berkaitan dengan proyek yang menggunakan anggaran Negara.
2. Kolaborasi yang lebih luas AJI Padang diminta untuk terus bekerja sama dengan lembaga antikorupsi, akademisi, dan lembaga lainnya.
3. Meningkatkan Kesadaran Publik: Perlu ada upaya yang lebih luas untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam mengawasi kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edy Susanto, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, , Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber lainnya

- Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara, Artikel ini diakses pada hari kamis tanggal 26 September 2024 Pukul 15.15 wib. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>
AJI Padang, artikel ini diakses pada hari Jumaat tanggal 4 Oktober2024 pukul 20.45 wib. <https://aji.or.id/node/11840>
Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Artikel ini diakses pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 16.29 wib. .

<https://www.icw.or.id/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>

D. Jurnal

Desca Lidya Natalia, 2019, Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Volume 512.472 .

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** pembimbing saya yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada, Dekan Fakultas Hukum Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.** Ketua Prodi hukum Piadana bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.